

INTISARI

Pekerja sektor informal selama ini telah menjadi kajian yang menarik dan marak diteliti. Sektor informal yang merupakan katup pengaman karena keterbatasan sektor formal, mempunyai kemudahan bagi angkatan kerja yang memasukinya. Penelitian mengenai pekerja sektor informal terutama di perkotaan selama ini telah banyak dikaji, oleh karena itu penelitian ini mengungkap salah satu sektor informal di perdesaan dengan tema tentang pemulung.

Penelitian ini meliputi pembahasan tentang aktivitas, hubungan sosial dan ekonomi, jam kerja dan pendapatan. Maksud penelitian tersebut tertuang dalam lima hipotesis yang diuji dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hipotesis pertama, keempat dan kelima bersifat kualitatif, sedangkan hipotesis kedua dan ketiga bersifat kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah tabel frekuensi, distribusi Kai-Kuadrat dengan alat uji independensi, dan analisis regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulung mempunyai hubungan fungsional eksploitatif dengan komponen dalam mata rantai perdagangan barang bekas, sedangkan dalam hubungan sosial dengan masyarakat tidak mengalami perbedaan perlakuan. Jam kerja pemulung berkisar antara 2 jam/hari sampai 11jam/hari dengan rata-rata jam kerja 7jam/hari. Rata-rata pendapatan pemulung dari kerjanya adalah Rp 32.100/bulan sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga dari pemulung adalah sebesar Rp 58.000/bulan. Rata-rata total pendapatan rumah tangga sebesar Rp 72.100 sehingga pendapatan rumah tangga dari pemulung memberikan kontribusi sebesar 69,09% pada pendapatan total rumah tangga.

Melihat fenomena yang dialami pemulung, maka perlu dilakukan upaya pembinaan dari aparat yang berwenang misalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pemerintah desa setempat, baik dalam bentuk pembinaan kualitas sumber daya manusia seperti peningkatan pendidikan maupun terutama pembinaan ekonomi. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan pembentukan arisan. Lebih jauh lagi adalah dibentuknya koperasi yang menangani proses penjualan dan transaksi barang bekas dalam upaya memendekkan mata rantai perdagangan. Selama ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemulung hanyalah pada pemulung di perkotaan, dengan tujuan pembersihan kota, sedangkan masyarakat pemulung sendiri terlepas dari pengamatan. Upaya pembinaan terhadap masyarakat pemulung secara tegas harus ditangani oleh instansi pemerintah, misalnya DKP atau Dinas Sosial.

ABSTRACT

Informal sector worker became interesting to be investigated and nowadays there are so many researchs in this area. Informal sector worker that act as savety worked because the limitation of formal sector, are ease to get for labour force. Informal sector research in urban areas were already investigated, therefore this research will try to cover informal sector worker ini rural areas, i.e. Banyu Urip village, Magelang, that the garbage worker would became the title.

This research investigated activities of worker garbage, social and economic relationship, time for work and their income. This research had five hypthesis that would be examined by using two analysis methods, qualitative and quantitative analysis. First, fourth and fifth hypothesis are qualitative analysis. On the other hand, second and third hypothesis are quantitative analysis. Quantitative analysis employ frequencies tabulation, Chi-Square distribution with independence analysis and linear regression analysis.

The results of this research shown that the garbage workers have functionally exploited in relationship with another components of used-goods chain trading. In the social life they were not discriminated. The garbage workers' profit is Rp. 150, but the other components (uplink) have profit twice compared to them. The garbage workers work-time range from 2 hours/day up to 11 hours/day, and the average work-time is 7 hours/day. The garbage workers income average are 31.200 rupiahs per month and the garbage workers house-hold income average are 58.000 rupiahs. The garbage workers total income was 72.100 rupiahs. Then it could be concluded that the garbage workers house-hold give 69,09% of the total income.

Based on facts described above, they need guidance from government agencies or NGO, for example Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), village administrator. The guidance may include improvement in quality of human resources, such as in education, and economic guidance. There are a strong need to cut the chain trading. This may be implemented by making a cooperative economic activities. The garbage workers guidance must be carried out by government agencies, for example DKP or Society department.